

**ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN SEKTOR BASIS
DI KABUPATEN WAJO TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

Oleh

ANDIKA

NIM 105710205714



**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN SEKTOR BASIS
DI KABUPATEN WAJO TAHUN 2012-2016**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi

Di susun dan diajukan oleh

ANDIKA

NIM 105710205714

Kepada :

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Andika, Nim: 105710205714, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0004/SK-Y/60201/091004/2018 M. Tanggal 29 Dzulkaidah 1439 H / 11 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulkaidah 1439 H

Makassar, _____

11 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawasan Umum: Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (..... *[Signature]*)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (..... *[Signature]*)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE.,MM (..... *[Signature]*)
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Hj. Naidah, SE., M.Si (..... *[Signature]*)
2. Dr. Muhammad Rusydi, SE., M.Si (..... *[Signature]*)
3. Dr. Andi Jam'an, SE., MM (..... *[Signature]*)
4. Asdar, SE., M.Si (..... *[Signature]*)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 90307



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Alokasi Anggaran Pembangunan Sektor Basis di Kabupaten Wajo Tahun 2012-2016"

Nama Mahasiswa : Andika
No. Stambuk/NIM : 105710205714
Program Studi : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Tim Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. H. Ikram Idrus, M.Si
NIDN: 0026036801

Pembimbing II,

Nasrullah, SE, MM
NIDN: 0914049104

Mengetahui,



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ismail Rasulong, S.E., M.M
NBM: 903 078

Ketua
Program Studi IESP,

Hj. Naidah, SE., M.Si
NBM: 710 561



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andika
Stambuk : 105710205714
Program Studi : S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Dengan Judul : "Alokasi Anggaran Pembangunan Sektor Basis di Kabupaten Wajo Tahun 2012-2016".

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 11 Agustus 2018
Yang Membuat Pernyataan



Andika

Diketahui Oleh :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



Ismail Rasulong, S.E., M.M
NBM: 903 078

Ketua
Program Studi IESP,

Hj. Naidah, SE., M.Si
NBM: 710 561

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.

(*Andika*)

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

Tuhan YME, karena hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.

Bapak dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembaha bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan

kita pasti bisa! Semangat!!

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Aamiinnn.

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang pantas terucap selain ungkapan puji syukur kepada Allah SWT, karena limpahan rahmat dan hidayahnya_Nyalah sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul “Alokasi Anggaran Pembangunan Sektor Basis di Kabupaten Wajo Tahun 2012-2016”, dan tak lupa pula mengirimkan salawat dan tazlim kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi Revolusioner sejati yang mampu merobek-robek bendera kekafiran dan mengkibarkan bendera ke islam, dan berkat beliau kita mampu merasakan sesuatu yang dulunya gelap gulita sampai sekarang kita mampu merasakan sesuatu yang terang benderang seperti sekarang ini.

Sembah sujud dan rasa terima kasih yang sedalam-dalam penulis hanturkan kepada ayahanda ABD. KADIR dan almarhuma ibunda TENRI SOLONG yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tulus dengan merelakan segalanya demi gemerlapnya masa depan penulis semoga diberi pahala yang berlipat ganda dan tetap berada dalam lindungan_Nya Allah SWT dan terkhusus untuk Ibunda semoga di lapangkan kuburannya dan mendapatkan tempat yang di hidayakan yaitu surga oleh Allah SWT karena berkat ibu lah yang tak pernah mengenal lelah memberikan pemahaman tentang kehidupan sehingga penulis bisa sampai sejauh ini, serta keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberi dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak melibatkan berbagai pihak olehnya itu merupakan tanggung jawab yang besar untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE. MM selaku Dekan beserta seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

3. Ibu Hj.Naidah, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu jalannya proses penelitian ini.
4. Bapak Dr.H.Ikram Idrus, M.Si. selaku Pembimbing I yang telah memberi banyak arahan dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Nasrullah, SE, MM. selaku pembimbing II yang sudah banyak meluangkan waktunya tanpa lelah memberi masukan dan menuntun penulis dalam merampungkan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu di Badan Pusat Statistik Kota Belopa Kabupaten Wajo serta Badan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Wajo, Peneliti mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam pelayanan dan penyediaan data dalam skripsi ini.
8. Terima kasih Kepada Sahabatku Sulkipli, Sulkadri, Ibnu Rusd, Ihsan Ardiyansyah, Nur Yaqin, dan Muliani yang selalu mendorong dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih Kepada Keluarga Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP3-14) yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam merampungkan skripsi ini.
10. Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya angkatan 2014 kalian adalah teman terbaik.
11. Serta kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu, penulis ucapkan banyak terima kasih , walau namanya tidak disebutkan diatas semoga mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Suatu kewajaran apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan karena penulis menyadari akan keterbatasan waktu, pikiran, tenaga, dan financial, baik dalam penyediaan literatur maupun dalam pengolahan data.

Dengan kata ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi yang terbaik namun kesalahan tak bisa dihindarkan karena penulis dibatasi oleh ruang dan

waktu. Menyadari akan kekurangan dan keterbatasan itu penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini olehnya itu masukan dari berbagai pihak khususnya pembaca, baik berupa kritikan maupun saran senantiasa diharapkan dan akan diterima dengan senang hati.

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini dengan iringan doa serta harapan bermanfaat bagi pembaca dan penulis utamanya.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalam'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 11 Agustus 2018

Andika

ABSTRAK

Andika, 2018. Alokasi anggaran pembangunan sektor basis di kabupaten wajo tahun 2012-2016, Skripsi Program Studi Ilmu Keonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. dibimbing oleh pembimbing I Ikram Idrus dan pembimbing II Nasrullah.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengukur dan menganalisis sektor–sektor apa saja yang menjadi sektor basis di Kabupaten Wajo serta mengetahui alokasi anggaran daerah dapat meningkatkan pembangunan sektor basis di Kabupaten Wajo tahun 2012-2016. Untuk mengaplikasikan tujuan tersebut digunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Wajo memiliki empat sektor basis yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengadaan listrik dan gas; dan perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor. Artinya bahwa sektor-sektor basis tersebut memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Alokasi anggaran pembangunan untuk sektor basis di kabupaten wajo di dasarkan atas urutan prioritas pembangunan sesuai dengan tersedianya dana dan kebutuhan pembangunan serta disesuaikan pula dengan kondisi sosial, politik dan ekonomi kabupaten wajo. Dalam priode tahun 2014-2016 anggaran pembangunan untuk sektor pertanian relatif konstan sebesar 33,67% sampai 48,04% dari total realisasi anggaran pembangunan. Sedangkan sektor perdagangan memperoleh anggaran pembangunan yang besarnya cukup berfluktuatif.

Kata Kunci : Alokasi Anggaran Daerah, Pembangunan Sektor Basis.

ABSTRACT

Andika, 2018. The allocation of development budget of base sector in wajo district year 2012-2016, Thesis Study Program of Development Economics Faculty of Economics and Business Studies University of Muhammadiyah Makassar. guided by counselor I Ikram Idrus and mentor II Nasrullah.

This study aims to measure and analyze what sectors are the basic sector in Wajo Regency and to know the allocation of local budget can increase the development of base sector in Wajo Regency in 2012-2016. To apply these objectives, a quantitative descriptive method is used. The result of research indicates that Wajo Regency has four basic sectors namely agriculture, forestry and fishery sector; mining and quarrying sectors; electricity and gas procurement sector; and large and retail trade, as well as car and motorcycle repairs. This means that the basic sectors have a comparative advantage compared to other regions in South Sulawesi Province. The allocation of development budgets for the base sector in wajo district is based on the order of development priorities in accordance with the availability of funds and development needs and is also adjusted to the social, political and economic conditions of the wajo district. In the period 2014-2016 the development budget for the agricultural sector is relatively constant at 33.67% to 48.04% of the total realization of development budget. While the trade sector gets a development budget that is quite volatile.

Keywords : Local Budget Allocation, Base Sector Development.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Alokasi Anggaran Daerah.....	9
B. Pembangunan Sektor Basis	19
C. Tinjauan Empiris.....	23
D. Kerangka Pikir	27
E. Hipotesis	28
BAB III. METODE PENELITIAN	29
A. Jenis penelitian	29

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisis	31
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambar Umum Kabupaten Wajo.....	33
B. Hasil penelitian	37
C. Pembahasan	53
BAB V. PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
DAFTAR LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel I.1	Distribusi Presentasen PDRB Kabupaten Wajo Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2012-2016 (persen).....	6
Tabel II.1	Tabel Penelitian Terdahulu	25
Tabel IV.1	Luas Wilayah Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan Tahun 2016	35
Tabel IV.2	Indikator Kependudukan Wajo Tahun 2012-2016	36
Tabel IV.3	Penduduk Kabupaten Wajo Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2016	37
Tabel IV.4	Realisasi anggaran pembangunan Kabupaten Wajo Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)	38
Tabel IV.5	Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Wajo 2012-2016 (persen).....	39
Tabel IV.6	PDRB Perkapita Kabupaten Wajo Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah).....	43
Tabel IV.7	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wajo Tahun 2012-2016 (persen)	44
Tabel IV.8	Indeks <i>Location Qoutien</i> Kabupaten Wajo Per Sektor Ekonomi Tahun 2012 – 2016	54
Tabel IV.9	Realisasi Anggaran Pembangunan Pada Sektor Basis di Kabupaten Wajo Periode Tahun 2012-2016 (000Rp)	56

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar II.1	Sekema Kerangka Pikir.....	27
Gambar IV.1	Peta Administrasi Kabupaten Wajo.....	34
Gambar IV.2	Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha seri 2010 Kabupaten Wajo Tahun 2016 (persen)	39
Gambar IV.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wajo Periode Tahun 2012-2016	42
Gambar IV.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wajo, 2016 (Persen).....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki oleh daerah. Hal ini terkait dengan potensi pembangunan yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan kegiatan sektor ekonomi yang dominan.

Belakangan ini berkembang isu global mengenai pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, desentralisasi, deregulasi, debirokratisasi swastanisasi dan sumberdaya manusia yang oleh berbagai ahli dilihat sebagai suatu pertimbangan pemikiran mengenai pembangunan dan membatasi birokrasi-birokrasi pemerintahan pusat, baik menyangkut penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan. Sedangkan disatu sisi sebagian besar Negara berkembang dalam perencanaan menganut sistem dan mekanisme perencanaan yang cenderung bersifat sentralistik yang ditandai berbagai pengaturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pada tingkat daerah, praktis hanya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Keragaman Indonesia yang sangat besar mengakibatkan kebutuhan masing-masing daerah yang berbeda, sentralistik kebijakan dan dominasi pemerintah pusat telah menimbulkan ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah terhadap

pemerintah pusat. Pada anggaran pemerintah daerah, komponen sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat sangat tinggi, melampaui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang Nafarin (2012:19).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita dalam jangka panjang dan diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan Arsyad (2010:11). Keadaan geografis Indonesia yang merupakan kepulauan menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan pemerataan pembangunan pada setiap daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, maka pembangunan yang berdimensi local (pemerintah dan masyarakat daerah) yang dianggap sebagai subjek dan objek pembangunan. Kemandirian daerah yang bertumpuh pada kekuatan sendiri dalam suatu kesatuan masyarakat nasional sangat dibutuhkan, termasuk bidang keuangan daerah.

Kondisi demikian akan meningkat kemampuan daerah dalam mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat dalam rangka mengelola dan mengawasi sumber daya yang dimiliki, baik fisik maupun non fisik sehingga daerah mempunyai kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri untuk memenuhi keinginan serta kebutuhan masyarakatnya. Sejak otonomi daerah di laksanakan pada tanggal 1 Januari 2001, berbagai kebijakan yang menyangkut keuangan daerah dan APBD mengalami perubahan diantaranya melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dibandingkan sebelum otonomi daerah dilaksanakan sumber pendapatan daerah relatif terbatas, yakni hanya mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah pusat memutuskan untuk menerapkan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam UU Otonomi daerah melalui tiga pendekatan yang umum dilakukan oleh banyak Negara, yakni; 1) pendekatan berdasarkan presentase, 2) pendekatan berdasarkan formula, 3) pendekatan yang berdasarkan kebutuhan yang bersifat khusus atau *incidental*. Salah satu pilar dalam penjabaran UU tersebut yakni aspek pembiayaan, tanpa keseimbangan pemberian kewenangan antara tugas dan tanggung jawab dengan aspek pendanaan, maka esensi UU tersebut menjadi kabur. Aspek inilah yang merupakan salah satu masalah utama dalam pemberdayaan dalam upaya pemerataan pembangunan.

Sebagai dinamisator pembangunan, anggaran belanja pembangunan diharapkan mampu menunjang berkembangnya potensi ekonomi masyarakat. Hal ini terutama karena sebagai sumber utama pembiayaan investasi di sektor pemerintah, jumlah dan alokasi anggaran pembangunan sangat mempengaruhi kesinambungan pembangunan terutama dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, khususnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang memang tidak dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat dan dunia usaha.

Studi mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) selama ini, sebagian besar hanya terfokus pada besaran angka-angka bagaimana meningkatkan penerimaan dan bagaimana mengalokasikan dana secara sektoral. Semetara tuntutan global memberikan pertanyaan yang sangat mendasar, sejauh mana implikasi anggaran tersebut terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi pendapatan dan mendorong perekonomian daerah. Karena tuntutan terhadap peran pemerintah bukan pada alokasi pembiayaan pembangunan yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan investasi yang besar, tetapi bagaimana memperlihatkan kontribusinya dalam alokasi anggaran yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, kesejahteraan rakyat, distribusi pendapatan dan mendorong ekonomi daerah.

Pemerintah dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam manajemen pembangunan, terutama dalam hal alokasi pembiayaan pembangunan untuk mempunyai kemampuan “mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Dengan tetap tidak melupakan fungsi-fungsi pembiayaan terhadap variable-variabel pembangunan lainnya.

Desentralisasi muncul untuk menghapus kebijakan dari pemerintahan pusat yang bersifat sentralistik sehingga memunculkan karakter dan lebih memperdayakan daerah, karena dengan demikian pembangunan daerah tidak merata. Alur desentralisasi akan selalu mengarah pada perkembangan yang lebih baik, desentralisasi bagian dari otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalisasi (daerah setempat) demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Namun masalah lain yang muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yaitu masalah timbulnya ketimpangan fiskal.

Ketimpangan Fiskal merupakan adanya ketidakseimbangan atau adanya perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal. Ketimpangan fiskal vertikal menunjukkan adanya disparitas antara kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara pemerintah pusat dengan tingkat pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah daerah). Ketimpangan fiskal horizontal menunjukkan perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya Hamid (2005:128) dalam (Solihin dan lesatri, 2010).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2012-2016 atas dasar harga kostan tahun 2010 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Wajo mengalami pasang surut. Masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan berjalan lambat, namun sektor pertanian masih merupakan urutan pertama yang memberikan kontribusi sebesar 32,87% dalam total PDRB. Dan Adapun sektor yang berkontribusi

paling rendah yaitu : Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,03%.

Tabel I.1

Distribusi Presentasen PDRB Kabupaten Wajo Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2012-2016 (persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32.28	32.02	32.53	32.97	34.55
2. Pertambangan dan Penggalan	22.07	21.88	22.70	20.36	17.29
3. Industri Pengolahan	3.46	3.44	3.43	3.60	3.71
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
6. Konstruksi	8.46	9.12	8.94	9.46	9.58
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.80	14.06	13.34	13.62	14.76
8. Transportasi dan Pergudangan	2.87	2.96	3.02	3.31	3.20
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32
10. Informasi dan Komunikasi	1.51	1.52	1.36	1.30	1.34
11. Jasa Keuangan	2.34	2.41	2.29	2.34	2.53
12. Real Estate	2.71	3.02	3.11	3.31	3.41
13. Jasa Perusahaan	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.16	4.03	3.83	4.13	3.87
15. Jasa lainnya	3.23	3.37	3.24	3.32	3.40
16. Jasa Pendidikan	1.22	1.27	1.32	1.37	1.43
17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.37	0.38	0.38	0.40	0.41
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Wajo.

Anggaran pemerintah daerah dan pembiayaan pembangunan, baik sumber maupun alokasi atau distribusinya, merupakan suatu topik yang menarik untuk dikaji. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk memilih judul : **“Alokasi Anggaran Pembangunan Sektor Basis di Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2012-2016”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang sebelumnya, maka dapat di rumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Sektor apa saja yang menjadi sektor basis di Kabupaten Wajo ?
2. Apakah alokasi anggaran daerah dapat meningkatkan pembangunan sektor basis di Kabupaten Wajo tahun 2012-2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengukur dan menganalisis sektor–sektor apa saja yang menjadi sektor basis di Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui alokasi anggaran daerah dapat meningkatkan pembangunan sektor basis di Kabupaten Wajo tahun 2012-2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu ekonomi khususnya berkaitan dengan pengkajian kebijakan ekonomi daerah. Disamping itu penelitian ini diharapkan juga memberikan kontribusi yaitu :

- a. Menambah wacana, informasi dan kajian tentang pembangunan ekonomi daerah, khususnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Sebagai bahan masukan untuk dipertimbangkan bagi pengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi instansi Sebagai upaya evaluasi dan dasar pengambilan keputusan lebih lanjut mengenai upaya pemerintah daerah untuk menciptakan kemandirian dan

kemampuan Kabupaten Wajo dalam membiayai kegiatan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

- b. Bagi Akademisi diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau bahan perbandingan bagi peminat penelitian selanjutnya, baik dalam topik dan objek yang sama maupun dalam topik dan objek yang berbeda dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alokasi Anggaran Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Anggaran (*Budgeting*) merupakan alat perencanaan, pedoman, pengendalian dan alat pengawasan di bidang keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non-laba. Bagi suatu perusahaan, penyusunan

anggaran merupakan alat yang dipakai untuk membantu aktivitas kegiatannya agar lebih terarah. Dengan menggunakan data-data anggaran, maka perkembangan perusahaan akan dapat dipelajari dengan teliti dan berkesinambungan. Nafarin (2012:10). Anggaran dapat berjalan dengan baik apabila dalam organisasi perusahaan tersebut ada dukungan aktif, baik dari pelaksanaan tingkat atas maupun tingkat bawah. Hal ini menyangkut kepada manusia, khususnya pada karyawan yang ada pada suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk memahami anggaran, maka pada bab ini akan dibahas mengenai teori yang berhubungan dengan anggaran.

Menurut Munandar (2010:1), "Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang".

Menurut Adisaputro (2010:02) mendefinisikan "Business Budget adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan koordinasi dan pengawasan".

Sedangkan menurut Nafarin (2012:15) mendefinisikan bahwa "Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa". Dari ketiga definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa secara umum anggaran merupakan suatu bentuk rencana aktivitas suatu kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu periode mendatang yang secara umum dinyatakan secara kuantitatif berdasarkan angka-angka yang dibuat dengan pertimbangan yang komprehensif.

Penyusunan anggaran berurusan dengan masa depan. Tujuan penyusunan anggaran bagi perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan di masa mendatang. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah

menyediakan informasi kepada pihak manajemen perusahaan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

Berikut adalah tujuan-tujuan lainnya yang terkait dengan penyusunan anggaran menurut (Sasongko dan Parulian 2013:3) :

1. Perencanaan Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.
2. Koordinasi Anggaran dapat mempermudah koordinasi antarbagian-bagian di dalam perusahaan.
3. Motivasi Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.
4. Pengendalian Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan.

Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2010:19), antara lain adalah sebagai berikut:

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
3. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
4. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan di perusahaan.

Selain tujuan, anggaran juga memiliki manfaat. Menurut Nafarin (2010:19), manfaat anggaran adalah sebagai berikut :

1. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama.

2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan.
3. Dapat memotivasi karyawan.
4. Menimbulkan rasa tanggung jawab tertentu pada karyawan.
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
6. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
7. Alat pendidikan bagi manajer.

Menurut Munandar (2010:10), fungsi anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu :

1. Sebagai pedoman kerja Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang.
2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju kesasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin.
3. Sebagai alat pengawasan kerja Anggaran berfungsi juga sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan apa yang tertuang didalam anggaran dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapat dinilai apakah telah sukses bekerja atau kurang.

Sedangkan menurut Mulyadi (2010:502), fungsi anggaran terdiri dari enam item yaitu :

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses rencana kerja
2. Anggaran merupakan cetak biru aktifitas yang akan dilaksanakan perusahaan dimasa yang akan datang.

3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang berhubungan yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer atas dan manajer bawah.
4. Anggaran berfungsi sebagai alat tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya.
5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan.
6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

Berdasarkan kedua uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi anggaran memiliki fungsi yang terkait dengan fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi menggerakkan dan fungsi pengawasan.

Menurut Munandar (2010:13), menjelaskan bahwa anggaran memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

1. Anggaran disusun berdasarkan taksiran-taksiran (*forecasting*). Betapapun cermatnya taksiran tersebut dibuat, namun amatlah sulit untuk mendapatkan taksiran yang benar-benar akurat sama sekali tidak berbeda dengan kenyataannya nanti.
2. Taksiran-taksiran dalam anggaran disusun dengan mempertimbangkan berbagai data, informasi dan faktor-faktor, baik yang *controllable* maupun *uncontrollable*. Dengan demikian, jika nantinya perubahan-perubahan terhadap data, informasi serta faktor-faktor tersebut, akan berubah pula ketetapan taksiran-taksiran yang telah disusun tersebut.
3. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan realisasi anggaran sangat tergantung pada manusia pelaksananya. Anggaran yang baik tidak akan bisa direalisasikan bilamana pelaksananya tidak mempunyai keterampilan serta kecakupan yang memadai.

Sedangkan menurut Ismatullah (2010:15), kelemahan anggaran antara lain :

1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat.
3. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.

Selain memiliki tujuan dan manfaat yang jelas telah kita ketahui diatas, maka kita juga harus menyadari bahwa anggaran juga memiliki kelemahan-kelemahan. Ini sangat menuntut kita untuk selalu teliti dalam menyusun anggaran dan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian yang berlangsung. Anggaran yang harus disusun suatu perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran. Semua aktivitas yang direncanakan suatu perusahaan di dalam periode mendatang harus di susun didalam suatu anggaran lengkap. Karena tanpa memiliki anggaran lengkap, maka aktivitas yang akan dilaksanakan tetapi tidak memiliki anggaran tersebut tetap diupayakan untuk dilaksanakan, maka aktivitas tersebut tidak dapat dinilai hasilnya.

Menurut Nafarin (2010:31), anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang sebagai berikut,

1. Dilihat dari segi dasar penyusunan, anggaran terdiri dari :
 - a. Anggaran variable (*variable budget*), yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda.
 - b. Anggaran tetap (*fixed budget*), yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu.
2. Dilihat dari segi cara penyusunan, anggaran terdiri dari :

- a. Anggaran periodik (*periodic budget*) adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran.
 - b. Anggaran kontinu (*continuous budget*) adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan.
3. Dilihat dari segi jangka waktu, anggaran terdiri dari :
- a. Anggaran jangka pendek (*short-range budget*) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun.
 - b. Anggaran jangka panjang (*long-range budget*) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran jangka panjang tidak mesti berupa anggaran modal.
 - c. Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek.
4. Dilihat dari segi bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut anggaran induk (*master budget*).
- a. Anggaran operasional (*operasional budget*) adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Anggaran operasional antara lain terdiri dari :
 - 1) Anggaran penjualan
 - 2) Anggaran biaya pabrik
 - 3) Anggaran biaya bahan baku
 - 4) Anggaran biaya tenaga kerja langsung
 - 5) Anggaran biaya overhead pabrik
 - 6) Anggaran beban usaha
 - b. Anggaran keuangan (*financial budget*) adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran keuangan terdiri dari :
 - 1) Anggaran kas

- 2) Anggaran piutang
 - 3) Anggaran persediaan
 - 4) Anggaran utang
 - 5) Anggaran neraca
5. Dilihat dari segi kemampuan menyusun, anggaran terdiri dari :
- a. Anggaran komprehensif (*comprehensive budget*) adalah rangkaian dari berbagai jenis anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap.
 - b. Anggaran parsial (*partially budget*) adalah anggaran yang disusun secara tidak lengkap atau anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja.
6. Dilihat dari segi fungsinya, anggaran terdiri dari :
- a. Anggaran tertentu (*appropriation budget*) adalah anggaran yang diperuntukkan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain.
 - b. Anggaran kinerja (*performance budget*) adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi (perusahaan), misalnya untuk menilai apakah biaya (beban) yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas.

Nafarin (2010:11), menegaskan bahwa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan.
2. Data waktu lalu.
3. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi.
4. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing.
5. Penelitian untuk pengembangan perusahaan.

Nafarin (2010:11), mengatakan bahwa dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan perilaku para pelaksana anggaran dengan cara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Anggaran harus dibuat serealitas mungkin, secermat mungkin sehingga tidak terlalu rendah, tidak menggambarkan kedinamisan, sedangkan anggaran yang dibuat terlalu tinggi hanyalah angan-angan.
2. Untuk memotivasi manajer pelaksana diperlukan partisipasi top manajemen (direksi).
3. Anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan, sehingga pelaksana tidak merasa tertekan tetapi termotivasi.
4. Untuk membuat laporan realisasi anggaran diperlukan laporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan dapat segera diantisipasi lebih dini.

Nafarin (2010:12), juga menyatakan bahwa anggaran yang dibuat juga akan mengalami kegagalan bila tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan anggaran yang tidak cakap, tidak mampu berfikir kedepan.
2. Kekuasaan membuat anggaran tidak tegas.
3. Pelaksana tidak cakap.
4. Tidak didukung oleh masyarakat.
5. Dana tidak cukup.

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menyusun anggaran sangat perlu memperhatikan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran, perilaku para pelaksana dan hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan pada anggaran yang telah dibuat.

B. Pembangunan Sektor Basis.

Perubahan sistem pemerintahan Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Telah membawa perubahan dalam sistem pembangunan, dimana pemerintah daerah diberi wewenang yang lebih dalam mengatur daerahnya masing-masing Sjafrizal (2014:14).

Perubahan yang terjadi pada dasarnya menyangkut dua hal pokok yaitu pertama, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan (Desentralisasi Pembangunan). Kedua, pemerintah diberikan sumber keuangan baru dan kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih besar (Desentralisasi Fiskal).. Pemberian wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah dimaksudkan agar proses pembangunan disesuaikan dengan permasalahan pokok yang dialami.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara local. Sedangkan keberhasilan pembangunan daerah, selain sebagai bentuk andil dalam pembangunan nasional, tetapi juga ditujukan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah, menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi Arsyad (2010: 374).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Upaya pembangunan yang dilakukan daerah dapat berupa kemakmuran wilayah, kemakmuran masyarakatnya maupun kedua-duanya. Seperti yang dijelaskan dalam Sjafrizal (2012: 156).

Pembangunan dalam mewujudkan kemakmuran wilayah (*place prosperity*), ditujukan agar kondisi fisik daerah lebih baik. Seperti halnya, sarana dan prasarana, perumahan dan lingkungan pemukiman, kegiatan ekonomi masyarakat, fasilitas pelayanan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan, kualitas lingkungan hidup dan lain lain. Meningkatkan kemakmuran wilayah dapat mendorong pesat peningkatan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan, hal tersebut disebabkan karena kondisi daerah yang sudah baik dapat menjadi daya tarik bagi para investor dalam menanamkan modalnya.

Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (*Competitive Advantage*) yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau *service industries*. Dalam teori basis ekonomi, perkembangan suatu wilayah ditentukan oleh besarnya permintaan ekspor (*demand*) oleh sektor basis. Mankiw (2012: 556).

Teori basis ekonomi dalam Arsyad (2010:367) merupakan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk kemudian diekspor, sehingga akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja. Asumsi tersebut memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor.

Teori basis ekspor murni dikembangkan pertama kali oleh Tiebout. Teori ini membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas sektor basis dan sektor non basis (Mahrita dkk :2016). Basis adalah kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri.

Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor ini bersifat *endogenous* (tidak bebas tumbuh). Pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan.

Teori basis ekonomi merupakan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Teori Basis yaitu memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam suatu kelompok industri bisa saja terdapat kelompok industri yang menghasilkan barang-barang yang sebagian diekspor dan sebagian lainnya dijual ke pasar lokal. Selain itu Teori Basis juga dapat digunakan sebagai indikasi dampak penggandaan (*multiplier effect*) bagi kegiatan ekonomi suatu wilayah (Ambardi dan Socia, 2002) dalam (Larasati, 2017).

Sektor basis ekonomi suatu wilayah dapat dianalisis dengan teknik *Location Quotient* (LQ), yaitu suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional Tarigan (2014:82). Analisis LQ digunakan untuk menentukan komoditas unggulan dari segi produksinya. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kegiatan basis dan bukan basis, diantaranya adalah teknik *Location Quotient* (LQ).

Pendekatan ini sering digunakan untuk mengukur basis ekonomi. Dalam teknik LQ pengukuran dari kegiatan ekonomi secara relatif berdasarkan nilai tambah bruto atau tenaga kerja. Analisis LQ juga dapat digunakan untuk menentukan komoditas unggulan dari sisi produksinya. Asumsi yang digunakan dalam teknik ini adalah semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat regional/nasional (pola permintaan secara geografis sama), produktivitas tenaga kerja, dan setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor. Pendekatan LQ mempunyai dua kelebihan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memperhitungkan ekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung (barang antara).

- b. Metode ini tidak mahal dan dapat diterapkan pada data distrik untuk mengetahui kecenderungan.

Kelebihan analisis *LQ* yang lainnya adalah analisis ini bisa dibuat menarik apabila dilakukan dalam bentuk *time series/trend*, artinya dianalisis selama kurun waktu tertentu. Dalam hal ini perkembangan *LQ* bisa dilihat untuk suatu komoditi tertentu dalam kurun waktu yang berbeda, apakah terjadi kenaikan atau penurunan Tarigan (2014:83).

C. Tinjauan Empiris

kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut alokasi anggaran pembangunan sektor basis. Dengan demikian penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi perbandingan dalam penelitian, untuk itu dalam pembagian ini akan di berikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tabel penelitian ini:

Sumenge (2013) melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. Dari hasil penelitiannya menunjukkan Anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2008 sampai tahun 2012 sudah efisien dengan tingkat efisiensi dibawah 60% pada tahun 2008 – 2011 yang masuk pada kategori sangat efisien, dan hanya pada tahun 2012 tingkat efisiensi berada di kisaran 60% - 80% yang memiliki kriteria efisien.

Devita dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi. Dari hasil penelitiannya menunjukkan pemerintah daerah masih bergantung secara keuangan terhadap transfer dana dari pusat dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah yaitu untuk meningkatkan belanja langsungnya.

Mayasari dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Amalia (2014) melakukan penelitian dengan judul Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah di Indonesia. Dari hasil penelitiannya menunjukkan Kabupaten Bone Bolango selama 5 tahun terakhir ini secara rata-rata hanya mempunyai 3 sektor basis. Ketiga sektor basis tersebut adalah Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan.

Mangilaleng dkk 2015 melakukan penelitian dengan judul *Analysis Of The Sector's Flagship South Minahasa Regency*. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Minahasa Selatan dengan perhitungan laju pertumbuhan ekonomi terdapat 3 sektor ekonomi yaitu sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor konstruksi.

Tabel II.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ariel Sharon Sumenge (2013)	Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.	Anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2008 sampai tahun 2012 sudah efisien dengan tingkat efisiensi dibawah 60% pada tahun 2008 – 2011 yang masuk pada kategori sangat efisien, dan hanya pada tahun 2012 tingkat efisiensi berada di kisaran 60% - 80% yang memiliki kriteria efisien.
2	Andri Devita; Arman Delis;	Pengaruh Pendapatan Asli	Data yang digunakan	pemerintah daerah masih bergantung secara

	Junaidi (2014)	Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi	dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data APBD dan jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Jambi dalam rentang waktu Tahun 2007 – 2012.	keuangan terhadap transfer dana dari pusat dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah yaitu untuk meningkatkan belanja langsungnya
3	¹ Luh Putu Rani Mayasari, ¹ Ni Kadek Sinarwati, ² Gede Adi Yuniarta (2014)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng	Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
4	Fitri Amalia (2014)	Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah di Indonesia	Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder	Kabupaten Bone Bolango selama 5 tahun terakhir ini secara rata-rata hanya mempunyai 3 sektor basis. Ketiga sektor basis tersebut adalah Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan.
5	¹ Ekaristi Jekna Mangilaleng, ² Debby Rotinsulu, dan ³ Wensy Rompas 2015	<i>ANALYSIS OF THE SECTOR'S FLAGSHIP SOUTH MINAHASA REGENCY</i>	Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data yang menggambarkan variabel pertumbuhan ekonomi	Di ketahui bahwa yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Minahasa Selatan dengan perhitungan laju pertumbuhan ekonomi terdapat 3 sektor ekonomi yaitu sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor konstruksi.

Sumber: hasil olah data jurnal, 2018

D. K
erangka
Pikir

A

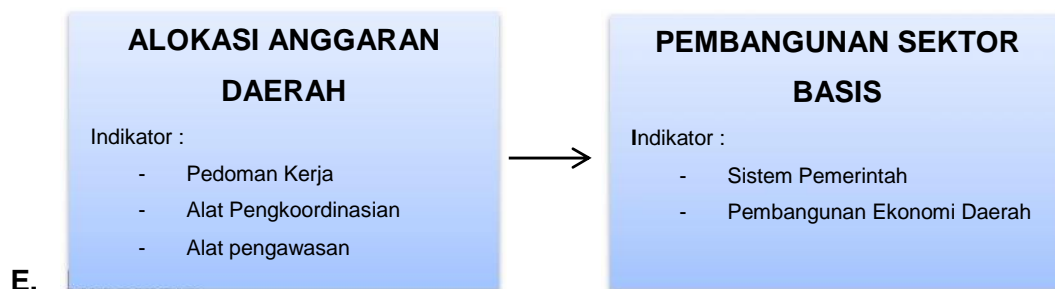
anggaran
adalah
rencana
kegiatan
keuangan yang
berisi
perkiraan
n
belanja
yang
disusulk
an
dalam
satu
periode
dan
sumber
pendapatan yang

diusulkan untuk membiayai belanja tersebut Noerdiman (2010:69) mengemukakan bahwa anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.

Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) yang cukup tinggi sektor basis ekonomi suatu wilayah dapat dianalisis dengan teknik *Location Quotient* (LQ), yaitu suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri disuatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara Nasional. Tarigan (2014:82)

Topik utama penulisan ini, ditekankan pada pola dan kebijaksanaan alokasi pembiayaan pembangunan daerah. Alokasi pengeluaran pembangunan daerah tersebut apakah meningkatkan pengembangan sektor basis dan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB di daerah tersebut. Kerangka penelitian ini sederhana dapat tervisualisasikan sebagai berikut:

Gambar II.1 Skema Kerangka Pikir



1. Diduga yang menjadi sektor basis di kabupaten wajo adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor dan adanya perubahan atau pergeseran peranan sektor-sektor ekonomi (sektor basis) terhadap PDRB Wajo.
2. Diduga bahwa Alokasi Anggaran Daerah dapat meningkatkan Pembangunan Sektor Basis di Kabupaten Wajo Tahun 2012-2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu kegiatan pada wilayah tertentu. Metode kuantitatif lebih cocok digunakan pada penelitian ini karena untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi ekonomi dilakukan dengan cara mengukur variabel-variabel yang terkait berdasarkan PDRB sektoral untuk mengungkap dan membuktikan secara matematis sederhana berbagai data yang bersifat kuantitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Wajo, yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun daerah penelitian bertempat di kantor (PEMDA) Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, kantor Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, dan kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo,

2. Waktu Penelitian

Kabupaten Wajo dijadikan objek penelitian karena dilihat dari letak geografis luas wilayah dan populasi penduduk menjadikan wilayah ini memiliki peranan penting dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih 2 bulan tahun 2018.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

1. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu peningkatan kapasitas dan volume produktif yang dihasilkan oleh suatu daerah.
2. Pembiayaan pembangunan yang tertuang dalam APBD disingkat anggaran (*budget*) adalah merupakan rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam

satu tahun yang dit uangkan dalam angka-angka rupiah. Pembiayaan pembangunan di daerah dibiayai dari dua sumber yakni (1) pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri baik dari pemerintah maupun swasta/ swadaya masyarakat dan (2) pendapatan yang berasal dari luar daerah baik yang asalnya dari pemerintah pusat atau pemerintah atasan maupun dari investasi swasta atau luar daerah.

3. Sektor Basis adalah sektor yang menghasilkan barang dan jasa, di samping untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya juga kebutuhan wilayah lain (ekspor).
4. PDRB adalah merupakan nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah pada satu tahun.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian di maksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang akan di olah dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu sebagai karya atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti, baik dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dilakukan secara langsung pada objek penelitian dalam hal ini (PEMDA) Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo.

E. Teknik Analisis

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis, maka model analisis yang digunakan adalah:

1. Analisis Sektor Basis

Untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang potensial dapat dikembangkan dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Wajo digunakan model "kuosien lokasi (*lucation Quotien*)" dengan cara membandingkan

peranannya dalam perekonomian wilayah itu dengan peranan kegiatan ekonomi (sektor ekonomi) yang sama dengan perekonomian regional ataupun nasional, atau dengan kata lain bahwa teknik ini menyajikan perbandingan kemampuan suatu sektor tertentu pada daerah yang diteliti dengan kemampuan kegiatan yang sama pada daerah yang lebih luas, dimana daerah yang diteliti menjadi bagiannya. Secara sistematis LQ dirumuskan sebagai berikut:

$$L = \frac{y_i/y}{Y/Y}$$

Keterangan :

LQ : Angka *Location Quotien* per sektor Kabupaten Wajo.

y_i : Angka PDRB per sektor Kabupaten Wajo.

y : Angka PDRB Kabupaten Wajo.

Y_i : Angka PDRB per sektor Propinsi Sulawesi Selatan.

Y : Angka PDRB Propinsi Sulawesi Selatan.

Setelah LQ dihitung maka diperoleh kesimpulan, bila nilai LQ suatu sektor >1 , maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Hal ini berarti sektor ini menguntungkan untuk dikembangkan lebih lanjut karena peranan sektor tersebut di daerah itu lebih baik menonjol dari pada peranannya secara regional atau nasional. Sebaliknya jika nilai LQ suatu sektor <1 , maka sektor tersebut merupakan sektor non basis, berarti sektor tersebut kurang menguntungkan untuk dikembangkan karena perencanaan sektor tersebut lebih kecil dari pada peranannya secara regional atau nasional.

2. Analisis deskriptif

Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran bagaimana alokasi anggaran pembiayaan pembangunan dalam APBD Kabupaten Wajo dari tahun ke tahun dalam menunjang pengembangan sektor basis digunakan analisis statistik deskriptif yakni dilakukan untuk menganalisis variabel-variabel yang berupa analisis

pengelaran pembangunan per sektor atau perhitungan statistik sederhana lainnya yang dianggap relevan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini baik angka mutlak (absolut) maupun dalam presentase. Penulisan secara deskriptif dari hasil penelitian ini, dilakukan dengan berpedoman pada sistematika penulisan :
(1) statemen (2) justifikasi (pembangunan) dan (dan) implikasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Kabupaten Wajo

1. Aspek Geografi

Kabupaten Wajo merupakan salah satu dari 24 (dua puluh empat) kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo terletak pada posisi astronomis di koordinat antara 3°39' - 4°16' Lintang Selatan dan 119° 53' - 120°27' Bujur Timur, dengan luas wilayah Kabupaten Wajo seluas 2.506,19 km² atau 4,01 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan berada pada ketinggian 0 hingga 500 m di atas permukaan laut. Lahan berbukit terbentang dari selatan ke utara. Dataran rendah terletak di bagian timur, selatan, tengah, dan barat. Danau Tempe terletak di bagian barat sedangkan pesisir pantai membentang di sebelah timur menghadap Teluk Bone sepanjang 103 km garis pantai.

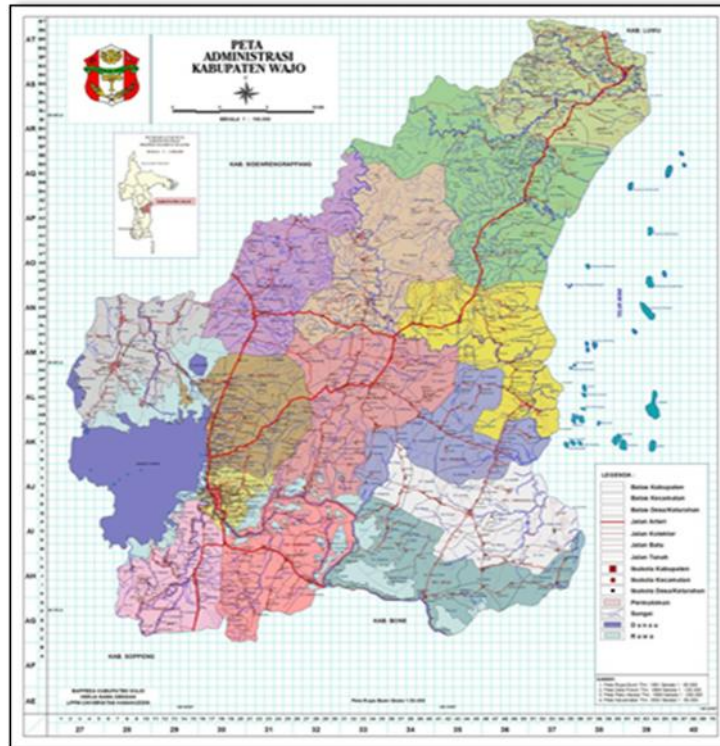
Apabila dilihat secara geostrategis regional Pulau Sulawesi, maka Kabupaten Wajo yang berada pada bagian selatan merupakan daerah yang dilewati jalur transportasi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Posisi strategis tersebut dapat membawa dampak bagi eksistensi Kabupaten Wajo terhadap mobilitas baik barang/jasa maupun orang. Posisi Kabupaten Wajo dengan ibukotanya di Sengkang, merupakan daerah transit, dengan akses penghubung ke daerah-daerah lain yang berpusat pada wilayah strategis baik di Provinsi Sulawesi Selatan seperti Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu, Kota Pare-pare, dan Kabupaten Toraja.

Batasan administrasi Kabupaten Wajo sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Selatan : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap

Untuk lebih jelasnya mengenai administrasi Kabupaten Wajo dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar IV.1 Peta Administrasi Kabupaten Wajo



Sumber : Bappeda Kabupaten Wajo, 2016

Secara administratif Kabupaten Wajo terdiri atas 14 wilayah kecamatan yang terdiri dari 190 desa/kelurahan meliputi 48 kelurahan dan 152 desa, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.1

Luas Wilayah Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas (km ²)	% Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Sabbangparu	137.75	5.3	12	3	15
2	Tempe	38.27	1.53	0	16	16
3	Pammana	162.1	6.47	14	2	16
4	Bola	220.13	8.78	10	1	11
5	Takkalalla	179.76	7.17	11	2	13

6	Sajoanging	167.01	6.66	6	3	9
7	Penrang	154.9	6.18	9	1	10
8	Majauleng	225.92	9.01		4	18
9	Tanasitolo	154.6	6.17	15	4	19
10	Belawa	172.3	6.88	6	3	9
11	Maniangpajo	175.96	7.02	5	3	8
12	Gilireng	147	5.87	8	1	9
13	Keera	368.36	14.70	9	1	10
14	Pitumpanua	207.13	8.26	23	4	27
Jumlah		2,511.19	100	142	48	190

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2015 (Diolah)

2. Aspek Demografi

a. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya yang potensial untuk mengelola pembangunan. Keberadaan penduduk di suatu daerah diharapkan dapat memajukan pembangunan di wilayah daerah tersebut. Penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2016 kurang lebih berjumlah 394.495 jiwa yang terdiri dari 188.727 laki-laki (47,84 persen) dan 205.768 perempuan (52,16 persen). Pertumbuhan penduduk Kabupaten Wajo tergolong rendah, dari tahun 2012 hingga 2016 jumlah penduduk Kabupaten Wajo hanya tumbuh dalam kisaran 0,32 hingga 0,38 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 0,38 persen. Fenomena ini didasari oleh mobilitas penduduk Wajo untuk berbagai alasan seperti bekerja, mencari pekerjaan atau sekolah di luar daerah Wajo. Selain itu, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan juga mengalami penurunan sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk.

Tabel IV.2

Indikator Kependudukan Wajo Tahun 2012-2016

Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Jumlah Penduduk	389.284	390.603	391.980	393.218	394.495
Laki-Laki	185.603	186.411	187.215	187.910	188.727
Perempuan	203.681	204.192	204.765	205.308	205.768
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,38	0,34	0,35	0,32	0,32
Rasio Jenis Kelamin	91	91	91	91	91
Rata-Rata Anggota Rumah Tangga	4	4	4	4	4

Sumber : BPS Kabupaten Wajo

Salah satu indikator kependudukan yang dapat menggambarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin yaitu rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 orang penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Wajo pada tahun 2012 hingga 2016 tidak berubah, yaitu sebesar 91. Artinya, pada tahun 2016 dari 100 orang penduduk perempuan yang ada di Kabupaten Wajo terdapat sebanyak 91 orang penduduk laki-laki. Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Wajo tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.3
Penduduk Kabupaten Wajo Menurut Jenis Kelamin dan
Kelompok Umur Tahun 2016

No	Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
1	0 - 4	16.739	16.071	32.810
2	5 - 9	16.119	15.221	31.340
3	10 - 14	16.213	15.106	31.319
4	15 - 19	17.391	16.931	34.322
5	20 - 24	16.774	17.266	34.040
6	25 - 29	15.785	16.470	32.255
7	30 - 34	13.025	15.018	28.043
8	35 - 39	12.960	15.495	28.455
9	40 - 44	13.248	15.912	29.160
10	45 -49	12.967	15.663	28.630
11	50 - 54	10.797	12.697	23.494
12	55 - 59	8.040	9.780	17.820
13	60 - 64	6.793	7.985	14.778
14	65 - 69	5.119	6.734	11.853
15	70 - 74	3.489	4.579	8.068
16	75+	3.268	4.840	8.108

Sumber: badan pusat statistik Kabupaten Wajo

Pada tahun 2016, kelompok umur 15 -19 merupakan populasi terbesar di Kabupaten Wajo yaitu sebanyak 34.322 jiwa sedangkan kelompok umur 70 – 74 merupakan populasi terkecil yaitu sebanyak 8.068 jiwa.

B. Hasil penelitian

1. Pengeluaran Pembangunan

Dalam 5 tahun pengamatan, anggaran pembangunan di Kabupaten Wajo terlihat cukup berfluktuatif. Alokasi anggaran pembangunan yang terbesar dalam 5 tahun terakhir, terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 155.826.527.742,00 milyar. sedangkan alokasi anggaran pembangunan terendah adalah pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 76.000.265.855,00 milyar.

Tabel IV.4

Realisasi anggaran pembangunan Kabupaten Wajo

Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Tahun	Anggaran Pembangunan
2012	76.000.265.855,00
2013	82.197.640.943,00
2014	121.830.927.680,00
2015	131.524.484.325,78
2016	155.826.527.742,00

Sumber : bappeda, nota keuangan Kabupaten Wajo

2. Struktur Ekonomi

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB Kabupaten Wajo tahun 2010-2016 diperoleh angka distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, yang menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Semakin besar persentase pembentukan PDRB suatu lapangan usaha semakin besar pula pengaruh lapangan usaha tersebut dalam

perekonomian. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Lapangan usaha dalam pembentukan PDRB dibagi menjadi tiga kelompok yaitu primer meliputi pertanian dan pertambangan penggalian; sekunder meliputi industri pengolahan, listrik gas air dan konstruksi; serta tersier yang terdiri atas perdagangan, transportasi dan jasa.

Tabel IV.5

Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Wajo 2012-2016 (persen)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,28	32,02	32,53	32,97	34,55
2 Pertambangan dan Penggalian	22,07	21,88	22,70	20,36	17,29
3 Industri dan Pengolahan	3,46	3,44	3,43	3,60	3,71
4 Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
6 Konstruksi	8,46	9,12	8,94	9,46	9,58
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,80	14,06	13,34	13,62	14,76
8 Transportasi dan Pergudangan	2,87	2,96	3,02	3,31	3,20
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32
10 Informasi dan Komunikasi	1,51	1,52	1,36	1,30	1,34
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	2,34	2,41	2,29	2,34	2,53
12 Real Estate	2,71	3,02	3,11	3,31	3,41
13 Jasa Perusahaan	0,10	0,11	0,10	0,11	0,11
14 Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,16	4,03	3,83	4,13	3,87
15 Jasa Pendidikan	3,23	3,37	3,24	3,32	3,40
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,22	1,27	1,32	1,37	1,43
17 Jasa Lainnya	0,37	0,38	0,38	0,40	0,41
PDRB	100	100	100	100	100

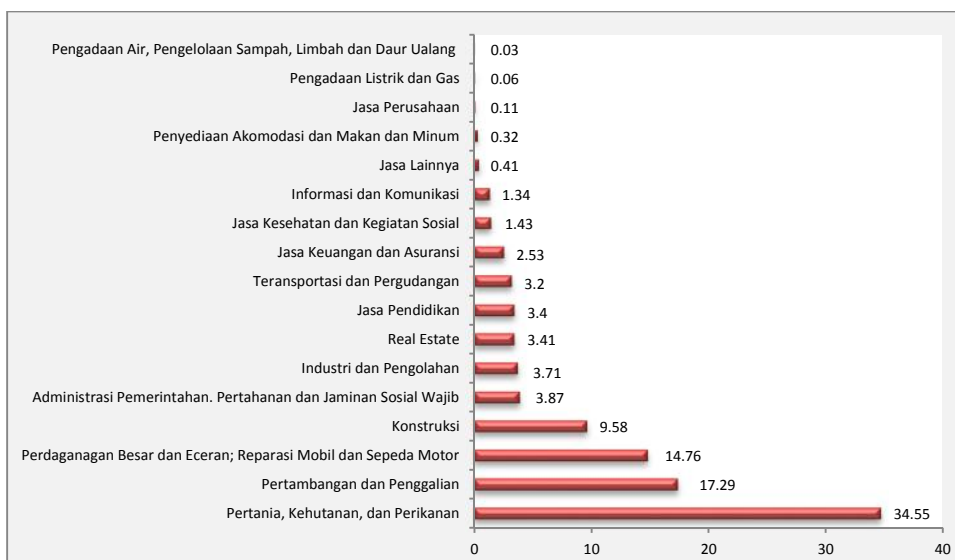
Sumber : BPS Kabupaten Wajo

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Gambar IV.2 Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha

seri 2010 Kabupaten Wajo Tahun 2016 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Wajo

Pada periode 2012 hingga 2016 struktur perekonomian Kabupaten Wajo didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang berarti bahwa basis perekonomian Kabupaten Wajo adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Lapangan usaha tersebut merupakan lapangan usaha utama yang mampu menyerap 46 persen dari total tenaga kerja di Kabupaten Wajo. (Sakernas, BPS 2015)

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Wajo tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya selama tahun 2012 hingga 2016. Hal ini terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Wajo. Sumbangan terbesar pada tahun 2016, sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, disusul Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran serta Konstruksi. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 5 persen.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan dari nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Nilai PDRB yang digunakan merupakan nilai PDRB atas dasar harga

konstan, dengan mengeluarkan pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan ekonomi.

Apabila dicermati dari tahun 2012 hingga 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo terlihat fluktuatif dalam kisaran 4 hingga 10 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2011 yang mencapai besaran 10,11 persen pertahun. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo ini sangat dipengaruhi oleh peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Wajo. Kabupaten Wajo merupakan daerah agraris yang menonjolkan pertanian sebagai pilar utama ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo tergantung pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Perekonomian Wajo pada tahun 2016 tumbuh melambat dibandingkan tahun 2015. Laju pertumbuhan PDRB Wajo tahun 2016 tercatat 4,98 persen per tahun. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 7,05 persen per tahun. Melambatnya ekonomi Kabupaten Wajo tahun 2016 disebabkan oleh kontraksi lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian hingga minus 6,16 persen per tahun sebagai dampak dari produksi gas alam tahun 2016 yang turun drastis sebesar 7,72 persen dibanding tahun 2015. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena *share* lapangan usaha Pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Wajo tergolong cukup besar.

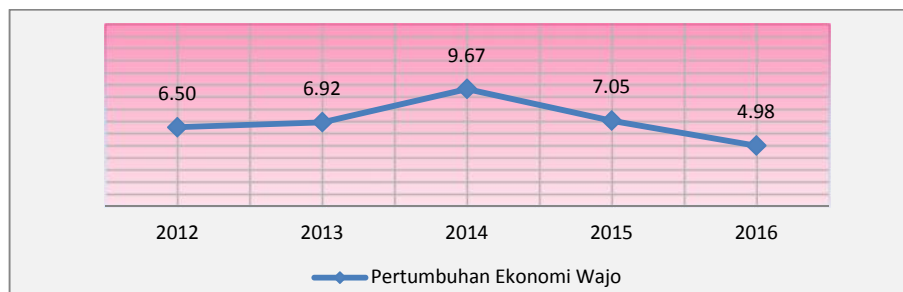
Disamping itu, melambatnya ekonomi Kabupaten Wajo juga dipengaruhi oleh kontraksi lapangan usaha Administrasi Pemerintahan dan sub lapangan usaha Industri Pengolahan Tembakau. Kebijakan pemerintah bertajuk penghematan anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2016 mengakibatkan kontraksi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan sebesar minus 1,25 persen. Hal serupa juga terjadi pada sub lapangan usaha Industri Pengolahan Tembakau. Industri Pengolahan Tembakau tahun 2016 mengalami pertumbuhan negatif hingga minus

3,32 persen sebagai dampak dari produksi tembakau yang menurun tajam sebesar 72 persen dibanding produksi tahun 2015.

Namun demikian, lapangan usaha Pertanian sebagai penopang utama perekonomian di Kabupaten Wajo mampu menahan gejolak pertumbuhan negatif lapangan usaha lain. Tahun 2016, lapangan usaha pertanian yang didominasi oleh pertanian tanaman pangan mampu mendorong ekonomi Wajo sebesar 9,82 persen. Kondisi iklim dan intensitas hujan di Kabupaten Wajo tahun 2016 lebih baik dibanding tahun 2015, yang berdampak positif meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditi utama tanaman pangan. Selain Pertanian, lapangan usaha Jasa keuangan, Informasi dan Komunikasi dan Perdagangan juga ikut andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo tahun 2016 masing-masing sebesar 15,38 persen, 9,36 persen dan 8,96 persen per tahun.

Gambar IV.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wajo Periode

Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Kabupaten Wajo

4. PDRB Perkapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dari tabel IV.6 dibawah ini terlihat perkembangan besaran PDRB per kapita Kabupaten Wajo selama periode 2012 hingga 2016. Dalam waktu 5 tahun dari 2012 hingga 2016, PDRB perkapita Kabupaten Wajo naik hampir dua kali lipat. Tahun 2012 PDRB per kapita Kabupaten Wajo berada pada angka 26,12 juta rupiah

naik mencapai 41,93 juta rupiah pada tahun 2016. PDRB per kapita Kabupaten Wajo atas dasar harga berlaku tahun 2016 telah mencapai 41,39 juta rupiah, dapat diartikan bahwa tiap penduduk di wilayah Wajo ini mampu memberikan kontribusi nilai tambah secara ekonomi sebesar 41,39 juta rupiah selama tahun 2016. Nilai PDRB perkapita Kabupaten Wajo secara riil yang digambarkan dengan PDRB per kapita tahun 2016 atas dasar harga konstan 2010 mencatatkan kenaikan sebesar 4,65 persen dibanding tahun 2015. PDRB perkapita atas dasar harga konstan ini lebih mencerminkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.

Tabel IV.6

PDRB Perkapita Kabupaten Wajo Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Tahun	Atas Harga Berlaku	Atas Harga Konstan 2010
(1)	(2)	(3)
2012	26,12	26,65
2013	29,77	24,14
2014	34,84	26,38
2015*	38,45	28,15
2016**	41,93	29,46

Sumber : BPS Kabupaten Wajo

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

5. Pertumbuhan dan Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Kabupaten Wajo menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau sublapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

Tabel IV.7

Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wajo

Tahun 2012-2016 (persen)

Lapangan Usaha/ Industry	2012	2013	2014	2015*	2016**
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,45	6,82	10,17	4,79	9,82
2 Pertambangan dan Penggalian	(3,25)	2,32	15,98	9,27	(6,16)

3	Industri dan Pengolahan	7,36	8,14	5,20	6,86	7,79
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,72	12,83	6,58	10,96	6,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,55	4,01	0,82	3,37
6	Konstruksi	16,29	11,96	5,70	7,75	6,08
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,39	5,35	8,00	7,03	8,96
8	Transportasi dan Pergudangan	9,41	9,56	8,37	6,31	5,36
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum	10,75	11,21	8,48	6,93	7,69
10	Informasi dan Komunikasi	13,15	14,64	4,44	9,96	9,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	16,43	10,71	4,79	7,85	15,38
12	Real Estate	14,12	16,33	10,18	8,53	6,57
13	Jasa Perusahaan	15,57	17,01	6,50	5,46	7,76
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,13	6,55	2,41	7,48	(1,25)
15	Jasa Pendidikan	9,68	12,03	4,79	8,14	7,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,11	12,18	10,68	7,66	7,80
17	Jasa Lainnya	8,06	8,34	7,34	7,11	8,63
	PDRB	6,50	6,92	9,67	7,05	4,98

Sumber : BPS Kabupaten Wajo

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terbagi menjadi sub lapangan usaha tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu dan sub lapangan usaha perikanan. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi lapangan usaha penopang perekonomian di Kabupaten Wajo. Pada tahun 2016 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku, yakni sebesar 34,55 persen. Bahkan dalam tiga tahun terakhir peranan kategori ini terhadap PDRB cenderung naik, yang membuktikan kategori ini adalah penggerak utama ekonomi di Kabupaten Wajo.

Pertumbuhan riil tahun 2016 pada kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tercatat sebesar 9,82 persen atau naik dua kali lipat dibanding pertumbuhan tahun 2015. Pertumbuhan positif kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2016 ini didorong oleh pertumbuhan sub lapangan usaha

tanaman pangan yang mencapai 11,05 persen serta sub lapangan usaha perikanan yang mampu tumbuh sebesar 9,07 persen. Tingginya pertumbuhan sub lapangan usaha tanaman pangan tahun 2016 dipengaruhi oleh kenaikan produksi komoditi padi sebesar 13,97 persen dan komoditi jagung sebesar 5,27 persen dibanding tahun 2015. Kondisi iklim dan intensitas curah hujan yang cukup sepanjang tahun 2016 berpengaruh terhadap kenaikan produksi kedua komoditi unggulan tanaman pangan tersebut.

b. Pertambangan dan Penggalian

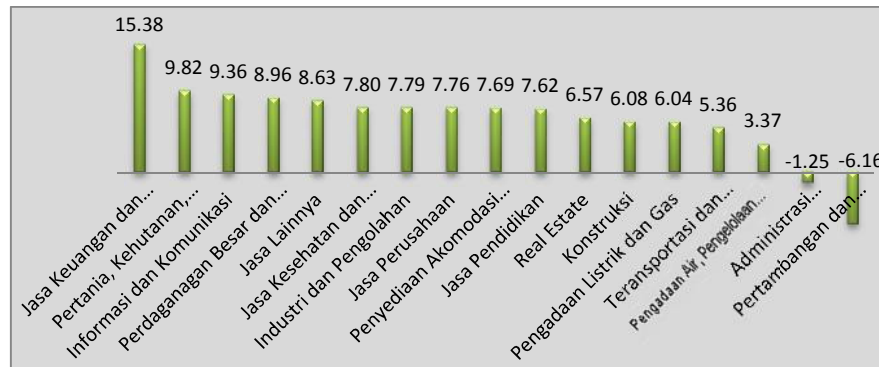
Peranan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian terhadap total PDRB Kabupaten Wajo merupakan yang terbesar kedua setelah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Tercatat dari tahun 2012 hingga 2016 lapangan usaha ini memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap perekonomian Kabupaten Wajo. Tahun 2016 peranan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 17,29 persen dari total PDRB Kabupaten Wajo. Keberadaan tambang gas bumi di Kabupaten Wajo memberikan andil terbesar dalam pembentukan nilai tambah lapangan usaha ini. Terlebih mulai tahun 2014 sebagian masyarakat Kabupaten Wajo telah dapat menikmati gas kota sebagai bahan bakar rumah tangga.

Dalam tiga tahun terakhir, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian menunjukkan pertumbuhan yang cenderung melambat. Bahkan pada tahun 2016 lapangan usaha ini mengalami kontraksi yang ditandai dengan pertumbuhan negatif hingga minus 6,16 persen. Hal tersebut diakibatkan oleh sub lapangan usaha pertambangan gas bumi yang mengalami kontraksi pertumbuhan hingga menembus angka minus 7,47 persen. Penurunan kinerja sub lapangan usaha pertambangan gas bumi merupakan dampak dari penurunan volume produksi gas alam sebesar 7,72 persen. Namun disisi lain, sub lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian Lainnya mampu menahan kontraksi lapangan usaha ini dengan pertumbuhan sebesar 8,14 persen. Terjadinya kontraksi pertumbuhan lapangan

usaha pertambangan dan penggalian ini menjadi faktor penyebab utama melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo tahun 2016.

Gambar IV.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan

Usaha Kabupaten Wajo, 2016 (Persen)



Sumber : BPS

Kabupaten Wajo

c. Industri Pengolahan

Selama tahun 2012-2016, lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan kontribusi sekitar 3 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Lapangan usaha ini ditopang oleh industri makanan dan minuman yang cukup beragam di Kabupaten Wajo.

Secara keseluruhan, kategori Industri Pengolahan pada periode tahun 2014-2016 mengalami pertumbuhan positif dengan kecenderungan naik per tahunnya. Tahun 2016 pertumbuhan lapangan usaha ini sebesar 7,79 persen, naik dibanding tahun 2015 yang tercatat 7,13 persen per tahun. Peningkatan laju pertumbuhan lapangan usaha Industri Pengolahan tahun 2016 didorong oleh pertumbuhan industri makanan minuman yang mencapai 8,53 persen.

d. Pengadaan Listrik dan Gas

Selama periode tahun 2012-2016, peranan kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkisar antara 0,06 persen hingga 0,09 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Meskipun laju pertumbuhan kategori ini di Provinsi Sulawesi

Selatan sempat mengalami kontraksi namun di Kabupaten Wajo justru mampu tumbuh positif hingga 6,04 persen per tahun. Pertumbuhan positif ini dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan listrik yang naik signifikan dari tahun sebelumnya akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat baik rumah tangga, pemerintah maupun swasta akan pasokan listrik.

e. **Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang**

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini selama tahun 2012-2016 hanya sebesar 0,03 hingga 0,04 persen terhadap perekonomian di Kabupaten Wajo. Pada tahun 2016 kategori ini mampu mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,37 persen per tahun. Angka ini relatif naik jika dibandingkan tahun 2015 yang hanya tumbuh sebesar 0,82 persen. Kenaikan pertumbuhan lapangan usaha ini didorong oleh kenaikan produksi air bersih setelah beroperasinya pompa air tambahan.

f. **Konstruksi**

Pada tahun 2016 kategori konstruksi menyumbang sebesar 9,58 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Wajo, meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 8,46 persen. Tren peningkatan peranan lapangan usaha ini juga terlihat pada tahun-tahun di antaranya (2014-2015) yaitu berturut-turut sebesar 8,94 dan 9,46 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi Kabupaten Wajo melambat dari 7,75 persen pada tahun 2015 menjadi 6,08 persen pada tahun 2016 yang mengindikasikan bahwa pembangunan fisik pada tahun 2016 kurang dibanding tahun 2015. Salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan konstruksi tahun ini disebabkan oleh

penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah khususnya pada pos anggaran belanja modal.

g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan *share* tertinggi ketiga, dengan kisaran angka antara 13 hingga 14 persen terhadap total nilai tambah Kabupaten Wajo. Pada tahun 2016, kontribusi kategori ini mencapai 14,76 persen dari total PDRB. Perdagangan besar dan eceran yang cukup berkembang mempengaruhi besarnya peranan kategori ini terhadap perekonomian Kabupaten Wajo. Laju pertumbuhan kategori ini tercatat naik dari 7,03 persen pada tahun 2015 menjadi 8,96 persen pada tahun 2016. Naiknya volume perdagangan tahun 2016 dipengaruhi oleh membaiknya kinerja lapangan usaha pertanian, karena arus perputaran ekonomi perdagangan di masyarakat Wajo lebih bertumpu pada lapangan usaha tersebut.

h. Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 sub lapangan usaha, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Pada tahun 2016 kategori ini memberikan kontribusi sebesar 3,20 persen terhadap total PDRB Wajo dan 80 persen diantaranya bersumber dari nilai tambah Angkutan Darat. Meskipun menunjukkan tren perlambatan selama 2012-2016, Kategori ini mampu tumbuh positif hingga 5,36 persen pada tahun 2016.

i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2016, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Wajo sebesar 0,32 persen, dimana 80 persennya disumbang dari penyediaan makan minum. Secara keseluruhan,

kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 7,69 persen pada tahun 2016, naik dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 6,93 persen.

j. Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Wajo selama tahun 2012-2016 tercatat sekitar 1,3 persen. Sedangkan pertumbuhan riil kategori informasi dan komunikasi tahun 2016 menjadi yang tertinggi ketiga dari seluruh kategori komponen pembentuk PDRB yaitu sebesar 9,36 persen per tahun.

k. Jasa Keuangan dan Asuransi

Selama periode tahun 2012-2016 kategori jasa keuangan dan asuransi memberikan kontribusi berturut-turut sebesar 2,34 persen, 2,41 persen, 2,29 persen, 2,34 persen dan 2,53 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha jasa perantara keuangan merupakan penyumbang terbesar pada kategori ini. Selama tahun 2012-2015, kontribusinya mendominasi dengan lebih dari 70 persen terhadap PDRB kategori jasa keuangan dan asuransi. Tahun 2016, pertumbuhan kategori ini menjadi yang tertinggi di antara pembentuk komponen PDRB. Kategori jasa keuangan mampu tumbuh positif hingga 15,38 persen pada tahun 2016.

l. Real Estat

Kategori real estate memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Wajo dengan peranan antara 2 hingga 3 persen dari total nilai PDRB. Selama tahun 2012-2016, secara berturut-turut sumbangan kategori real estate sebesar 2,71 persen, 3,02 persen, 3,11 persen, 3,31 persen dan 3,41 persen. Meskipun *share* terhadap total PDRB tergolong kecil, kategori ini mencatatkan pertumbuhan yang cukup besar di setiap tahunnya selama 2012-2016.

Pertumbuhan kategori ini pada tahun 2016 sebesar 6,57 persen per tahun, melambat dibanding tahun 2015 yang mencapai 8,53 persen.

m. Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah dalam kisaran 0,09 hingga 0,11 persen terhadap total PDRB. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Wajo. Sedangkan laju pertumbuhannya pada tahun 2016 tercatat meningkat mencapai 7,76 persen dibanding tahun 2015.

n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2012-2016 peranannya tidak mengalami banyak perubahan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 4,16 persen, 4,03 persen, 3,83 persen, 4,13 persen dan 3,87 persen. Sedangkan laju pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami kontraksi hingga minus 1,25 persen pada tahun 2016. Fenomena tersebut diakibatkan oleh kebijakan pemerintah berupa penghematan anggaran pada pertengahan tahun 2016, yang berimbas pada turunnya realisasi belanja pemerintah.

o. Jasa Pendidikan

Pada tahun 2016 jasa pendidikan menyumbang sebesar 3,40 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo, naik dibandingkan tahun 2012 sebesar 3,23 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kabupaten Wajo meningkat dari 4,79 persen pada tahun 2014 menjadi 7,62 persen pada tahun 2016.

p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2012-2016 peranan kategori ini relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi tahun 2012 hingga 2016 berturut-turut sebesar 1,22 persen, 1,27 persen, 1,32 persen, 1,37 persen dan 1,43 persen dari total PDRB Wajo. Sedangkan laju pertumbuhannya selama 2012-2016 tercatat cukup tinggi, dalam kisaran 7 hingga 12 persen per tahun. Hal tersebut mengindikasikan jasa kesehatan di Kabupaten Wajo bertumbuh positif sejalan dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan akan jasa kesehatan.

q. **Jasa lainnya**

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Wajo relatif kecil yaitu berturut-turut sejak 2012-2016 yaitu sekitar 0,37 persen hingga 0,41 persen dari total PDRB Wajo. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu bernilai positif dan lebih dari 7 persen per tahun, bahkan mencapai 8,63 persen pada tahun 2016.

C. Pembahasan

1. Analisa Sektor Basis

Analisis Sektor Basis bertujuan untuk mengidentifikasi sektor basis dari struktur ekonomi Kabupaten Wajo. Angka LQ > 1 untuk sektor tertentu menunjukkan keunggulan komperatif sektor tersebut. Hal ini berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis. Data yang digunakan adalah PDRB Kabupaten Wajo dan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2012-2016. Hasil analisis LQ terhadap PDRB Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.8

Indeks *Location Qoutien* Kabupaten Wajo Per Sektor Ekonomi
Tahun 2012 – 2016

Lapangan Usaha	Nilai LQ					Rerata LQ	Klasifikasi Sektor
	2012	2013	2014	2015	2016		
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,41	1,45	1,42	1,41	1,46	1,43	Basis

2	Pertambangan dan Penggalian	3,56	3,47	3,55	3,62	3,44	3,53	Basis
3	Industri Pengolahan	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	non basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,09	1,14	1,02	1,15	1,12	1,10	Basis
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,3	0,29	0,29	0,29	0,94	0,42	Non Basis
6	Konstruksi	0,73	0,74	0,72	0,72	0,73	0,73	Non Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,1	1,09	1,08	1,07	1,09	1,09	Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,82	0,85	0,89	0,88	0,88	0,86	Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0,28	0,28	0,27	0,28	0,29	0,28	Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,67	0,69	0,67	0,67	0,7	0,68	Non Basis
12	Real Estate	0,8	0,86	0,86	0,87	0,89	0,85	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	0,24	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,85	0,88	0,86	0,86	0,88	0,87	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	0,59	0,62	0,61	0,61	0,63	0,61	Non Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,63	0,65	0,64	0,63	0,64	0,64	Non Basis
17	Jasa Lainnya	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	Non Basis
Total		13,86	14,09	13,94	14,12	14,77	0,83	

Sumber : BPS Kabupaten Wajo Data Diolah

Hasil estimasi menunjukkan bahwa selama periode pengamatan yaitu dari tahun 2012 sampai 2016, terdapat empat sektor ekonomi di Kabupaten Wajo yang merupakan kategori Sektor Basis yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengadaan listrik dan gas; dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor karena empat sektor tersebut memiliki LQ >1.

Hal ini menunjukkan bahwa empat sektor tersebut memiliki potensi untuk di kembangkan karna empat sektor tersebut memiliki kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Kabupaten Wajo dan memiliki kemampuan dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Wajo secara keseluruhan.

Adapun sektor-sektor lainnya memiliki LQ < 1 dikategorikan sebagai non basis hal ini berarti bahwa sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang tidak terlalu besar terhadap PDRB Kabupaten Wajo. Dari tabel IV.8 menunjukkan bahwa yang merupakan sektor non basis dalam struktur PDRB Kabupaten Wajo adalah Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor Konstruksi ; Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Real Estate; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor Jasa Pendidikan; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Sektor Jasa Lainnya.

2. Analisis Deskriptif

Alokasi pengeluaran pembangunan seperti yang tercantum dalam APBD merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo maka di perlukan investasi, baik yang dilaksanakan oleh swasta maupun oleh pemerintah daerah melalui pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran pembangunan seperti yang tercermin dalam APBD adalah segala macam pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan daerah dalam kaitannya sebagai daerah otonomi. Untuk melihat perkembangan alokasi pengeluaran pembangunan pada sektor-sektor unggulan (sektor basis) di Kabupaten Wajo, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.9

Realisasi Anggaran Pembangunan Pada Sektor Basis di Kabupaten Wajo
Periode Tahun 2012-2016 (000 Rp)

Tahun	Anggaran Pembangunan	Sektor Pertanian	Persentase Anggaran	Sektor Perdagangan	Persentase Anggaran
2012	76.000.265.855,00	32.176.787.000,00	42,34	4.760.200.000,00	6,26
2013	82.197.640.943,00	34.219.559.454,00	41,63	5.595.505.445,00	6,81
2014	121.830.927.680,00	58.529.535.000,00	48,04	18.784.442.500,00	15,42
2015	131.524.484.325,78	59.667.426.034,27	45,37	20.014.858.821,00	15,22
2016	155.826.527.742,00	52.473.764.101,00	33,67	34.267.081.983,00	21,99

sumber : Bappeda di Kabupaten Wajo

Dalam 5 tahun terakhir, realisasi anggaran pembangunan untuk sektor pertanian dan sektor perdagangan di Kabupaten Wajo terlihat cukup berfluktuatif. Pada tahun 2012, anggaran pembangunan untuk sektor pertanian dan sektor perdagangan yaitu masing-masing besar Rp 32.176.787.000,00 dan Rp

4.760.200.000,00 atau 42,34% dan 6,26% dari total realisasi anggaran pembangunan.

Pada tahun 2013, anggaran pembangunan untuk sektor pertanian adalah sebesar Rp 82.197.640.943,00 atau 41,63% dari total realisasi anggaran pembangunan. Sedangkan sektor perdagangan memperoleh anggaran pembangunan sebesar Rp 5.595.505.445,00 atau sebesar 6,81% dari total realisasi anggaran pembangunan.

Dalam periode tahun 2014 sampai tahun 2016, anggaran pembangunan untuk sektor pertanian relatif konstan sebesar 33,67% sampai 48,04% dari total realisasi anggaran pembangunan. Sedangkan sektor perdagangan memperoleh anggaran pembangunan yang besarnya cukup berfluktuatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sektor basis di Kabupaten Wajo selama periode 2012-2016 yaitu analisis sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalan; sektor pengadaan listrik dan gas; dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang artinya keempat sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan juga sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo. Hal ini ditandai dengan nilai indeks LQ sektor tersebut lebih dari 1 ($LQ > 1$).
2. Alokasi anggaran pembangunan untuk sektor basis di kabupaten wajo di dasarkan atas urutan prioritas pembangunan sesuai dengan tersedianya dana dan kebutuhan pembangunan serta disesuaikan pula dengan kondisi sosial, politik dan ekonomi kabupaten wajo. Dalam priode tahun 2014-2016 anggaran pembangunan untuk sektor pertanian relatif konstan sebesar 33,67% sampai 48,04% dari total realisasi anggaran pembangunan. Sedangkan sektor perdagangan memperoleh anggaran pembangunan yang besarnya cukup berfluktuatif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, dapat diajukan saran yang dapat dipertimbangkan dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah kabupaten wajo dalam rangka memajukan pelaksanaan pembangunan otonomi daerah. Kabupaten wajo, antara lain :

1. Pemerintah harus mempertimbangkan sektor-sektor yang merupakan sektor basis atau sektor unggulan yang perlu di kembangkan dengan tidak

mengabaikan sektor-sektor lainnya. Demikian pula dalam pengelolaan sektor basis tersebut, pemerintah daerah perlu memperhatikan keterkaitan sektor-sektor lain yang menunjang pengembangan sektor basis.

2. Perlu adanya identifikasi terhadap alokasi pengeluaran pembangunan pada sektor-sektor basis yang mempunyai prioritas untuk dikembangkan. Sehingga alokasi dana yang di peroleh dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat lebih terarah, di samping itu bagian yang di alokasikan untuk tujuan pembangunan dapat lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. 2014. Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah di Indonesia. *Jurnal*. vol.15 No. 1
- Adisaputro, G. 2010. *Manajemen Pemasaran (Analisis Untuk Perancangan Strategi Pemasaran)*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan.Pusat.Statistik.(BPS).diakses.dari..<https://wajokab.bps.go.id/dynamictable/2017/07/05/15/distribusi-persentase-pdrb-kabupaten-wajo-atas-dasar-harga-berlaku-tahun-2010---2016-persen-.html> diakses pada tanggal 2 Februari 2016 pada jam 20.20 WIB.
- Devita,A., Delis, A., dan Junaidi. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal*. vol. 2 No. 2
- Ismatulloh, D. 2010. *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Larasati N, D. 2017. Analisis Sektor Basis dan Sektor Unggulan Pembangunan Daerah Dan Strategi Pembangunannya. *Naskah Publikasi Karya Ilmiah*.
- Mahrta., Mintarti, S., dan Fitriadi. 2016. Analisis Sektor Ekonomiprovinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*. Vol 12, No. 2
- Mangilaleng, E, J., Rotinsulu, D., dan Rompas, W. 2015. Analysis Of The Sector's Flagship South Minahasa Regency. *Jurnal*. vol. 15 No. 04
- Mankiw, N. G. 2012. *Essentials of Economic*. Mason: Cengage Learning.
- Mayasari, R, P, L., Sinarwati, N,K, dan Yuniarta, A, G. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bulelen. *Jurnal*. vol. 2 No. 1
- Mulyadi, 2010.*Akuntansi Manajemen* .Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Munandar, M. 2010. *Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Yogyakarta : BPFE.
- Nafarin, M. 2010. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nafarin, M. 2012. *"Penganggaran Perusahaan"*, Salemba empat, Jakarta.
- Nordiawan, D. 2010. *"Akuntansi Sektor Publik"*, Salemba Empat , Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 68 ayat (1), h. 29

Sasongko, C, dan Parulian, S, R. 2013. *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.

Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo- Persada.

Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Solihin, A dan Lesatri, N, A. 2010. Analisis Ketimpangan Fiskal di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga* Vol. 20 No. 1

Sumenge, A, S. 2013. Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal* vol. 1 No. 3

Tarigan, R. 2014. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Cetakan, Maret 2014, diterbitkan oleh PT.Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4),op.cit, h. 41

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan, Penerbit Forum Indonesia Maju, 2004.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1

BIODATA

Identitas Diri :

Nama : Andika
Tempat, Tanggal Lahir : Sengkang, 11 February 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Rumah : Hartaco Indah Blok 5h No. 6
Hp : 085343501710
Email : andikapebrihamdana@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

SD/ Sederajat : MTS Madrasa Ibtidayya
SMP/ Sederajat : SMP Tamalate Makassar
SMA/Sederajat : SMK YPLP PGRI 1 Makassar
Strata Satu (S1) : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas
Muhammadiyah Makassar (2014 – 2018)

Makassar, 11 Agustus 2018

ANDIKA

Lampiran 2

SRN CO 0000468


PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Achmad Yani No. 33 Tlp/Fax (0485) 323549
www.bpptpmwajokab@gmail.com, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

IZIN PENELITIAN / SURVEY
Nomor : 0468/IP/DPMPTSP/2018

Membaca : Surat Permohonan **ANDIKA** Tanggal **27-04-2018**
Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo

Memperhatikan : 1. Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 393/Izn-5/C.4-VIII/IV/37/2018 Tanggal 23 April 2018 Perihal : Permohonan Izin Penelitian
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **00468/IP/TIM-TEKNIS/IV/2018** Tanggal **30-04-2018** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan **IZIN PENELITIAN / SURVEY** kepada :

Nama : **ANDIKA**
Tempat / Tgl Lahir : **SENGKANG , 11 FEBRUARI 1995**
Alamat : **TIRONGE, DESA PADAELO, KEC. PENRANG**
Universitas / lembaga : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Judul Penelitian : **ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN SEKTOR BASIS DI KABUPATEN WAJO TAHUN 2012-2016**

Lokasi Penelitian : **1. BAPPEDA KAB. WAJO**
2. BPS KAB. WAJO

Lama Penelitian : **28 April 2018 s.d 28 Juni 2018**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah
3. Mentaati Semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat

Ditetapkan di : **Sengkang**
Pada Tanggal : **30 April 2018**


KEPALA DINAS,
NIVAH KAB. WAJO
Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA Tk. I**
NIP. SP. : **19651128 199002 1 001**

No. Reg : 0483/IP/DPMPTSP/2018
Retribusi : Rp. 0

Lampiran 3



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAJO**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. SYAHRIR WAHAB, M. Si
NIP : 19650825 199401 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I / IV.b
Jabatan : Kepala BPS Kabupaten Wajo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ANDIKA
Nomor Pokok : 10571 02057 14
Program Studi : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
A l a m a t : Jl. Hartako Indah Blok 5H Makassar

Bahwa yang bersangkutan telah selesai Mengadakan penelitian di BPS Kabupaten Wajo dengan judul Skripsi "ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN SEKTOR BASIS DI KABUPATEN WAJO TAHUN 2012-2016".

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Sengkang, 14 Mei 2018



Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Wajo,

Syahrir Wahab, M. Si
NIP. 19650825 199401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. Rusa Kompleks Kantor Bupati (0485) 21617 Sengkang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 500 / 266 / Bappeda


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Wajo, menerangkan bahwa:

Nama : **ANDIKA**
NIM : 105710205714
Program Studi : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Wajo dengan judul "**Alokasi Anggaran Pembangunan Sektor Basis di Kabupaten Wajo Tahun 2012-2016**".

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Sengkang, 16 Mei 2018

KEPALA BAPPEDA KAB. WAJO, *h*

H. ANDI MUSLIHIN, SE, MP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19671231 199303 1 078



Lampiran 5

Anggaran Pembangunan Untuk Sektor Basis di Kabupaten Wajo

Tahun 2012-2016

tahun	anggaran pembangunan	sektor pertanian	persentase anggaran	sektor perdagangan	persentase anggaran
2012	76.000.265.855,00	32.176.787.000,00	42,34	4.760.200.000,00	6,26
2013	82.197.640.943,00	34.219.559.454,00	41,63	5.595.505.445,00	6,81
2014	121.830.927.680,00	58.529.535.000,00	48,04	18.784.442.500,00	15,42
2015	131.524.484.325,78	59.667.426.034,27	45,37	20.014.858.821,00	15,22
2016	155.826.527.742,00	52.473.764.101,00	33,67	34.267.081.983,00	21,99

Lampiran 6

Produk domestik regional bruto kabupaten wajo seri 2010 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2012-2016 (juta rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015 *	2016 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3 281 341,99	3 723 438,82	4 442 161,62	4 984 673,34	5 713 013,74
B	Pertambangan dan Pengalihan	2 243 637,47	2 344 742,71	3 100 087,28	3 077 512,85	2 859 318,07
C	Industri Pengolahan	351 373,47	400 371,61	468 838,00	344 826,26	614 068,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8 395,08	8 930,28	9 597,38	9 786,43	10 333,58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3 895,46	4 004,89	4 233,56	4 391,36	4 718,01
F	Konstruksi	860 141,91	1 060 632,63	1 220 333,72	1 430 389,92	1 384 370,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 304 875,24	1 634 311,23	1 821 244,87	2 038 666,01	2 440 621,30
H	Transportasi dan Pergudangan	291 911,12	344 120,32	412 099,61	300 473,18	329 395,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	31 087,71	36 201,89	41 749,33	46 819,10	52 401,83
J	Informasi dan Komunikasi	153 914,71	176 379,76	183 213,30	197 021,62	222 339,39
K	Jasa Keuangan	238 268,40	280 328,71	313 093,06	333 193,03	418 433,41
L	Real Estate	275 443,22	350 706,31	424 443,05	300 078,80	363 751,76
M,N	Jasa Perusahaan	9 913,92	12 411,34	14 311,03	16 407,60	18 703,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	422 846,87	468 286,99	522 483,90	624 704,28	639 379,96
P	Jasa Pendidikan	328 074,48	391 373,73	443 010,24	301 236,30	362 736,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	123 333,23	147 780,09	179 710,74	207 781,36	233 906,01
R,S,T,U	Jasa lainnya	37 767,93	44 281,96	52 321,32	60 336,30	67 984,71
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		10 166 666,22	11 629 143,70	13 655 378,05	15 118 520,53	16 540 503,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 7

Produk domestik regional bruto kabupaten wajo seri 2010 atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2012-2016 (juta rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015 *	2016 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 723 151,22	2 908 820,66	3 204 621,32	3 338 015,56	3 687 742,96
B	Pertambangan dan Penggalian	1 947 334,63	1 992 433,78	2 310 896,40	2 323 196,76	2 369 630,32
C	Industri Pengolahan	320 158,36	346 207,14	364 215,42	389 197,77	419 515,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8 739,78	9 883,23	10 333,48	11 687,46	12 393,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3 687,65	3 707,95	3 836,46	3 888,28	4 019,31
F	Konstruksi	744 963,15	834 063,29	881 396,87	949 920,63	1 007 673,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 336 043,81	1 428 617,33	1 342 849,38	1 631 374,23	1 799 403,77
H	Transportasi dan Pergudangan	282 786,80	309 830,86	333 767,66	336 939,89	376 061,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27 880,53	31 006,42	33 637,01	35 969,64	38 734,84
J	Informasi dan Komunikasi	146 978,80	168 501,25	175 976,62	193 510,57	211 618,86
K	Jasa Keuangan	203 317,97	227 295,07	238 182,20	236 869,53	296 377,40
L	Real Estate	233 140,44	294 478,61	324 470,63	332 147,97	373 284,09
M,N	Jasa Perusahaan	9 176,78	10 737,63	11 435,31	12 059,67	12 995,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	368 319,54	392 434,46	401 875,18	431 923,09	426 529,76
P	Jasa Pendidikan	283 168,81	319 482,63	334 786,80	362 038,44	389 623,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101 446,23	113 801,47	123 931,43	133 599,33	146 170,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	34 763,54	37 663,96	40 429,98	43 304,55	47 041,73
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		8 819 110,07	9 428 972,74	10 341 082,17	11 069 645,43	11 620 820,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampiran 8

Distribusi Produk domestik regional bruto kabupaten wajo seri 2010 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2012-2016 (persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015 *	2016 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,28	32,02	32,53	32,97	34,53
B	Pertambangan dan Penggalian	22,07	21,88	22,70	20,36	17,29
C	Industri Pengolahan	3,46	3,44	3,43	3,60	3,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	8,46	9,12	8,94	9,46	9,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,80	14,06	13,34	13,62	14,76
H	Transportasi dan Pergudangan	2,87	2,96	3,02	3,31	3,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32
J	Informasi dan Komunikasi	1,31	1,32	1,36	1,30	1,34
K	Jasa Keuangan	2,34	2,41	2,29	2,34	2,53
L	Real Estate	2,71	3,02	3,11	3,31	3,41
M,N	Jasa Perusahaan	0,10	0,11	0,10	0,11	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,16	4,03	3,83	4,13	3,87
P	Jasa Pendidikan	3,23	3,37	3,24	3,32	3,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,22	1,27	1,32	1,37	1,43
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,37	0,38	0,38	0,40	0,41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Lampira 9

Produk domestik regional bruto sulawesi selatan seri 2010 atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2012-2016 (juta rupiah)

	Lapangan Usaha Industry	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	44 263.48	46 446.73	51 101.68	54 071.40	58 438.33
2	Pertambangan dan Penggalian	12 529.94	13 241.08	14 712.01	15 802.95	15 933.67
3	Industri Pengolahan	27 966.15	30 545.26	33 293.32	35 555.68	38 434.81
4	Pengadaan Listrik dan Gas	184.89	199.76	233.67	230.44	256.98
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	280.14	295.55	301.83	302.86	319.33
6	Konstruksi	23 541.78	26 029.33	27 666.60	29 967.28	31 989.28
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28 134.86	30 189.90	32 363.41	34 915.41	38 360.68
8	Transportasi dan Pergudangan	7 947.99	8 453.79	8 538.71	9 142.46	9 838.87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2 766.98	2 953.97	3 185.02	3 370.06	3 655.58
10	Informasi dan Komunikasi	12 069.61	13 768.38	14 560.09	15 712.60	16 989.31
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7 003.93	7 626.12	8 065.15	8 662.54	9 842.96
12	Real Estate	7 278.88	7 932.62	8 564.51	9 197.42	9 783.67
13	Jasa Perusahaan	876.38	937.42	1 000.75	1 059.53	1 142.99
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9 986.73	10 292.83	10 531.97	11 336.63	11 217.00
15	Jasa Pendidikan	11 064.39	11 918.82	12 473.45	13 378.00	14 295.97
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3 714.89	4 021.32	4 432.71	4 845.17	5 254.63
17	Jasa Lainnya	2 533.58	2 736.03	2 943.17	3 207.83	3 522.50
	Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Bruto	202 184.59	217 589.13	233 988.05	250 758.28	269 338.55

Sumber/Source: BPS Provinsi Sulawesi Selatan/ BPS-Statistic of Sulawesi Selatan Province

Lampiran 11

Analisis Location Quotient (LQ) dengan Indikator PDRB harga konstan 2010

1. Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Tahun	yi	y	Yi	Y	yi/y	Yi/Y	LQ
2012	2.723.181,22	8.819.110,06	44.263,48	202.184,60	0,3088	0,2189	1,41044
2013	2.908.820,66	9.428.972,74	46.446,73	217.589,13	0,3085	0,2135	1,44522
2014	3.204.621,32	10.341.082,17	51.101,68	233.988,05	0,3099	0,2184	1,41896
2015	3.358.015,56	11.069.645,41	54.071,40	250.758,28	0,3034	0,2156	1,40681
2016	3.687.742,96	11.620.820,85	58.438,33	269.338,56	0,3173	0,2170	1,46260

2. Pertambangan dan Penggalan

Tahun	yi	y	Yi	Y	yi/y	Yi/Y	LQ
2012	1.947.334,63	8.819.110,06	12.529,94	202.184,60	0,2208	0,0620	3,56299
2013	1.992.435,78	9.428.972,74	13.241,08	217.589,13	0,2113	0,0609	3,47243
2014	2.310.896,40	10.341.082,17	14.712,01	233.988,05	0,2235	0,0629	3,55415
2015	2.525.196,76	11.069.645,41	15.802,95	250.758,28	0,2281	0,0630	3,61975
2016	2.369.630,32	11.620.820,85	15.955,67	269.338,56	0,2039	0,0592	3,44213

3. Industri Pengolahan

Tahun	yi	y	Yi	Y	yi/y	Yi/Y	LQ
2012	320.158,36	8.819.110,06	27.966,15	202.184,60	0,0363	0,1383	0,26246
2013	346.207,14	9.428.972,74	30.545,26	217.589,13	0,0367	0,1404	0,26156
2014	364.215,42	10.341.082,17	33.293,32	233.988,05	0,0352	0,1423	0,24753
2015	389.197,77	11.069.645,41	35.555,68	250.758,28	0,0352	0,1418	0,24796
2016	419.515,46	11.620.820,85	38.454,81	269.338,56	0,0361	0,1428	0,25285

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Tahun	yi	y	Yi	Y	yi/y	Yi/Y	LQ
2012	1.356.045,81	8.819.110,06	28.154,86	202.184,60	0,1538	0,1393	1,10419
2013	1.428.617,33	9.428.972,74	30.189,90	217.589,13	0,1515	0,1387	1,09201
2014	1.542.849,38	10.341.082,17	32.363,41	233.988,05	0,1492	0,1383	1,07869
2015	1.651.374,25	11.069.645,41	34.915,41	250.758,28	0,1492	0,1392	1,07140
2016	1.799.403,77	11.620.820,85	38.360,68	269.338,56	0,1548	0,1424	1,08719

8. Transportasi dan Pergudangan

Tahun	yi	y	Yi	Y	yi/y	Yi/Y	LQ
2012	282.786,80	8.819.110,06	7.947,99	202.184,60	0,0321	0,0393	0,81569
2013	309.830,86	9.428.972,74	8.453,79	217.589,13	0,0329	0,0389	0,84576
2014	335.767,66	10.341.082,17	8.558,71	233.988,05	0,0325	0,0366	0,88768
2015	356.939,89	11.069.645,41	9.142,46	250.758,28	0,0322	0,0365	0,88441
2016	376.061,52	11.620.820,85	9.858,87	269.338,56	0,0324	0,0366	0,88408

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tahun	yi	y	Yi	Y	yi/y	Yi/Y	LQ
2012	27.880,53	8.819.110,06	2.766,98	202.184,60	0,0032	0,0137	0,23100
2013	31.006,42	9.428.972,74	2.953,97	217.589,13	0,0033	0,0136	0,24222
2014	33.637,01	10.341.082,17	3.185,02	233.988,05	0,0033	0,0136	0,23896
2015	35.969,64	11.069.645,41	3.370,06	250.758,28	0,0032	0,0134	0,24178
2016	38.734,84	11.620.820,85	3.655,58	269.338,56	0,0033	0,0136	0,24559

4. Pengadaan Listrik dan Gas

Tahun	yi	y	Yi	Y	yi/y	Yi/Y	LQ
2012	8.759,78	8.819.110,06	184,89	202.184,60	0,0010	0,0009	1,08618
2013	9.883,23	9.428.972,74	199,76	217.589,13	0,0010	0,0009	1,14173
2014	10.533,48	10.341.082,17	233,67	233.988,05	0,0010	0,0010	1,01999
2015	11.687,46	11.069.645,41	230,44	250.758,28	0,0011	0,0009	1,14890
2016	12.393,73	11.620.820,85	256,98	269.338,56	0,0011	0,0010	1,11780

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Tahun	yi	y	Yi	Y	yi/y	Yi/Y	LQ
2012	3.687,65	8.819.110,06	280,14	202.184,60	0,0004	0,0014	0,30179
2013	3.707,95	9.428.972,74	295,55	217.589,13	0,0004	0,0014	0,28952
2014	3.856,46	10.341.082,17	301,83	233.988,05	0,0004	0,0013	0,28910
2015	3.888,28	11.069.645,41	302,86	250.758,28	0,0004	0,0012	0,29083
2016	12.995,50	11.620.820,85	319,33	269.338,56	0,0011	0,0012	0,94322

6. Konstruksi

Tahun	yi	y	Yi	Y	yi/y	Yi/Y	LQ
2012	744.963,15	8.819.110,06	23.541,78	202.184,60	0,0845	0,1164	0,72547
2013	834.065,29	9.428.972,74	26.029,53	217.589,13	0,0885	0,1196	0,73945
2014	881.596,87	10.341.082,17	27.666,60	233.988,05	0,0853	0,1182	0,72101
2015	949.920,63	11.069.645,41	29.967,28	250.758,28	0,0858	0,1195	0,71806
2016	1.007.675,80	11.620.820,85	31.989,28	269.338,56	0,0867	0,1188	0,73009

10. Informasi dan Komunikasi

Tahun	yi	y	Yi	Y	yi/y	Yi/Y	LQ
2012	146.978,80	8.819.110,06	12.069,61	202.184,60	0,0167	0,0597	0,27918
2013	168.501,25	9.428.972,74	13.768,38	217.589,13	0,0179	0,0633	0,28242
2014	175.976,62	10.341.082,17	14.560,09	233.988,05	0,0170	0,0622	0,27348
2015	193.510,57	11.069.645,41	15.712,60	250.758,28	0,0175	0,0627	0,27898
2016	211.618,86	11.620.820,85	16.989,31	269.338,56	0,0182	0,0631	0,28870

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Tahun	yi	y	Yi	Y	yi/y	Yi/Y	LQ
2012	205.317,97	8.819.110,06	7.003,93	202.184,60	0,0233	0,0346	0,67206
2013	227.298,07	9.428.972,74	7.626,12	217.589,13	0,0241	0,0350	0,68780
2014	238.182,20	10.341.082,17	8.065,15	233.988,05	0,0230	0,0345	0,66823
2015	256.869,55	11.069.645,41	8.662,54	250.758,28	0,0232	0,0345	0,67172
2016	296.377,40	11.620.820,85	9.842,96	269.338,56	0,0255	0,0365	0,69788

12. Real Estate

Tahun	yi	y	Yi	Y	yi/y	Yi/Y	LQ
2012	253.140,44	8.819.110,06	7.278,88	202.184,60	0,0287	0,0360	0,79730
2013	294.478,61	9.428.972,74	7.932,62	217.589,13	0,0312	0,0365	0,85666
2014	324.470,63	10.341.082,17	8.564,51	233.988,05	0,0314	0,0366	0,85724
2015	352.147,97	11.069.645,41	9.197,42	250.758,28	0,0318	0,0367	0,86732
2016	375.284,09	11.620.820,85	9.783,67	269.338,56	0,0323	0,0363	0,88904

13. Jasa Perusahaan

Tahun	yi	Y	Yi	Y	yily	Yi/Y	LQ
2012	9.176,78	8.819.110,06	876,38	202.184,60	0,0010	0,0043	0,24006
2013	10.737,63	9.428.972,74	937,42	217.589,13	0,0011	0,0043	0,26433
2014	11.435,31	10.341.082,17	1.000,75	233.988,05	0,0011	0,0043	0,25855
2015	12.059,67	11.069.645,41	1.059,53	250.758,28	0,0011	0,0042	0,25784
2016	12.995,50	11.620.820,85	1.142,99	269.338,56	0,0011	0,0042	0,26352

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Tahun	yi	Y	Yi	Y	yily	Yi/Y	LQ
2012	101.446,25	8.819.110,06	3.714,89	202.184,60	0,0115	0,0184	0,62606
2013	113.801,47	9.428.972,74	4.021,32	217.589,13	0,0121	0,0185	0,65306
2014	125.951,46	10.341.082,17	4.432,71	233.988,05	0,0122	0,0189	0,64293
2015	135.599,33	11.069.645,41	4.845,17	250.758,28	0,0122	0,0193	0,63397
2016	146.170,03	11.620.820,85	5.254,63	269.338,56	0,0126	0,0195	0,64473

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Tahun	yi	Y	Yi	Y	yily	Yi/Y	LQ
2012	368.319,54	8.819.110,06	9.986,73	202.184,60	0,0418	0,0494	0,84552
2013	392.434,46	9.428.972,74	10.292,85	217.589,13	0,0416	0,0473	0,87984
2014	401.875,18	10.341.082,17	10.531,97	233.988,05	0,0389	0,0450	0,86339
2015	431.925,09	11.069.645,41	11.336,65	250.758,28	0,0390	0,0452	0,86307
2016	426.529,76	11.620.820,85	11.217,00	269.338,56	0,0367	0,0416	0,88132

17. Jasa Lainnya

Tahun	yi	Y	Yi	Y	yily	Yi/Y	LQ
2012	34.763,54	8.819.110,06	2.553,58	202.184,60	0,0039	0,0126	0,31210
2013	37.663,96	9.428.972,74	2.736,03	217.589,13	0,0040	0,0126	0,31767
2014	40.429,98	10.341.082,17	2.943,17	233.988,05	0,0039	0,0126	0,31082
2015	43.304,55	11.069.645,41	3.207,83	250.758,28	0,0039	0,0128	0,30580
2016	47.041,73	11.620.820,85	3.522,50	269.338,56	0,0040	0,0131	0,30952

15. Jasa Pendidikan

Tahun	yi	Y	Yi	Y	yily	Yi/Y	LQ
2012	285.168,81	8.819.110,06	11.064,39	202.184,60	0,0323	0,0547	0,59088
2013	319.482,63	9.428.972,74	11.918,82	217.589,13	0,0339	0,0548	0,61857
2014	334.786,80	10.341.082,17	12.473,45	233.988,05	0,0324	0,0533	0,60731
2015	362.038,44	11.069.645,41	13.378,00	250.758,28	0,0327	0,0534	0,61303
2016	389.625,77	11.620.820,85	14.296,97	269.338,56	0,0335	0,0531	0,63168

Lampiran 12

Indeks Location Qoutien Kabupaten Wajo Per Sektor Ekonomi tahun 2012-2016

No	Lapangan Usaha	Nilai LQ					Rerata LQ
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1,41	1,45	1,42	1,41	1,46	1,43
2	Pertambangan dan Penggalian	3,56	3,47	3,55	3,62	3,44	3,53
3	Industri Pengolahan	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,09	1,14	1,02	1,15	1,12	1,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	0,29	0,29	0,29	0,94	0,42
6	Konstruksi	0,73	0,74	0,72	0,72	0,73	0,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,10	1,09	1,08	1,07	1,09	1,09
8	Transportasi dan Pergudangan	0,82	0,85	0,89	0,88	0,88	0,86
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24
10	Informasi dan Komunikasi	0,28	0,28	0,27	0,28	0,29	0,28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,67	0,69	0,67	0,67	0,70	0,68
12	Real Estate	0,80	0,86	0,86	0,87	0,89	0,85
13	Jasa Perusahaan	0,24	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,85	0,88	0,86	0,86	0,88	0,87
15	Jasa Pendidikan	0,59	0,62	0,61	0,61	0,63	0,61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,63	0,65	0,64	0,63	0,64	0,64
17	Jasa Lainnya	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
	Total	13,86	14,09	13,94	14,12	14,77	0,83

Lampiran 13

Tempat penelitian Badan pusat statistik Kabupaten Wajo tahun 2018



Lampiran 14

Tempat Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kabupaten Wajo tahun 2018



RIWAYAT HIDUP



Andika, lahir tanggal 11 February 1995 di Sengkang sebagai anak tunggal dari pasangan Abd Kadir dengan Tenri solong. Pendidikan Sekolah Dasar dijalani di MTS Madrasa Ibtidayya dan tamat tahun 2008, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Tamalate Makassar tamat tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMK YPLP PGRI 1 Makassar tamat tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan memilih program Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) nya pada tahun 2018. Pengalaman organisasi Penulis dimulai sejak SMK yaitu sebagai anggota paskibraka. Kalangan mahasiswa aktif di salah satu ortom Muhammadiyah yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pernah aktif pada organisasi HMJ IESP, aktif pada organisasi Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Makassar dan serta aktif pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) PT Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.